

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan suatu daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur hingga menginisiasi program yang mencakup berbagai bidang melalui pengelolaan potensi daerah yang telah ada. Dengan potensi daerah yang dikelola secara efektif, produktivitas masyarakat secara ekonomi akan meningkat bersamaan dengan kesejahteraan masyarakatnya menciptakan lingkungan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan<sup>1</sup> Mewujudkan kota berkelanjutan menjadi salah satu upaya yang dijadikan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* atau SDGs poin ke 11, “Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan” yang disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai pada 2030.<sup>2</sup>

Kota berkelanjutan merupakan wujud kritik atas kondisi pembangunan di negara maju dan berkembang dalam lingkup sosial dan budaya yang dibahas dalam Roman Club oleh para ilmuwan. Kritik tersebut berkembang dengan melihat fakta bagaimana pembangunan tidak berbanding lurus dengan pertimbangan atas

---

<sup>1</sup> Hendra Sudrajat et al., 2024, *Otonomi Daerah Dan Good Governance*, ed. Anny Riwayati, Surabaya: Mitra Mandiri Persada, [https://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/951/1/Otonomi Daerah dan Good Governance.pdf](https://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/951/1/Otonomi%20Daerah%20dan%20Good%20Governance.pdf), hal.2-3.

<sup>2</sup> United Nations, *Sustainable Development Goals 11: Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable*, United Nations, diakses dalam <https://globalgoals.org/goals/11-sustainable-cities-and-communities/> (11/3/2025, 11:52 WIB).

keterbatasan sumber daya alam, jumlah populasi yang terus bertambah, industrialisasi yang menjamur, dan berbagai masalah lingkungan.

Dirumuskan dalam *Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada 1978, definisi awal pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan tanpa perusakan, serta beriringan dengan lingkungan<sup>3</sup> Definisi konsep pembangunan yang kemudian dipublikasikan oleh *World Commission on Environment and Development* dalam laporan dengan judul *Our Common Future* yaitu, pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.<sup>4</sup>

Dengan kota diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akibat urbanisasi, bersamaan dengan meningkatnya permasalahan mengenai pengelolaan limbah, sumber daya alam yang terbatas, serta polusi udara dan kemacetan, konsep *Smart City* diajukan sebagai salah satu solusi yang potensial.<sup>5</sup> Konsep *Smart City* sendiri memiliki cakupan definisi serta prioritas yang cukup luas yang mencakup pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik hingga pengembangan pendidikan dan keberlanjutan. *Smart City* dideskripsikan sebagai kota yang inklusif dan dibangun

---

<sup>3</sup> Tomislav Klarin, *The Concept of Sustainable Development: From Its Beginning to the Contemporary Issues*, Zangreb International Review of Economics and Business, Vol, 21 No, 1 (2018), hal. 71-73, <http://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005>.

<sup>4</sup> United Nation Secretary General and World Commission on Environment and Development, *Report of the World Commission on Environment and Development: "Our Common Future"*, Report of the World Commission on Environment and Development, August 1987, hal. 12/

<sup>5</sup> Angeliki Maria Toli and Niamh Murtagh, *The Concept of Sustainability in Smart City Definitions*, *Frontiers in Built Environment*, Vol, 6, No, 77 (2020), hal. 1, <https://doi.org/10.2289/fbuil.2020.00077>, Lausanne: Frontiers.

secara kolaboratif yang menggunakan berbagai teknologi dan data untuk mewujudkan kualitas hidup penduduk yang lebih baik. Bagaimana suatu kota berhasil melaksanakan hal tersebut dapat diidentifikasi melalui 6 (enam) karakteristik antara lain, kondisi lingkungan, ekonomi, transportasi, penduduk, tempat tinggal, dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, upaya Kota Probolinggo dalam mewujudkan kota berkelanjutan didasarkan pada kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs. Kerangka SDGs merupakan bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri atas 17 tujuan utama dan 169 sasaran yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015.<sup>7</sup> Menggunakan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai dasar pengembangan tujuan yang lebih ambisius, SDGs dirumuskan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan global yang bertujuan menghapuskan kemiskinan, melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan penanganan perubahan iklim melalui kerja sama antar pemerintah berskala global.<sup>8</sup>

Sejumlah faktor permasalahan yang diidentifikasi untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota berkelanjutan dalam kerangka SDGs antara lain adalah kemiskinan (SDGs 1), kesetaraan gender (SDGs 5), pencemaran air (SDGs 6), limbah padat (SDGs 11 dan 12), dan perubahan iklim (SDGs 13). Faktor-faktor tersebut didasarkan pada permasalahan yang paling berdampak bagi kehidupan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>7</sup> United Nations, 2015, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development..*

<sup>8</sup> Amelia Leavesley, Alexei Trundle, and Cathy Oke, *Cities and the SDGs: Realities and Possibilities of Local Engagement in Global Frameworks*, *Ambio*, Vol. 51, No. 6 (June 2022), hal. 1417.

masyarakat Kota Probolinggo yang pada sebelum tahun pelaksanaannya masih terdapat wilayah yang memiliki resiko tinggi berubah menjadi wilayah kumuh akibat minimalnya tingkat kesadaran akan sanitasi.<sup>9</sup>

Alasan peneliti memilih kerja sama Kota Probolinggo dan Helsingborg sebagai subyek penelitian adalah untuk mengidentifikasi adanya implementasi nyata di lingkungan Kota Probolinggo sepanjang proses kerja sama yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tahun 2012-2013, yang merupakan penerusan kesepakatan pemerintah pusat ke daerah di bawah program *SymbioCity* yang ditandatangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kedutaan Swedia. Dan tahun 2014-2022, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh kedua kota untuk menjalin kerja sama lebih lanjut. Kerja sama yang berlanjut menggunakan program dan dijalankan dengan lembaga penanggungjawab berbeda ini cukup menarik untuk diteliti.

Kerja sama ini berlandaskan visi yang dijalankan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo tahun 2010 hingga 2014 yang berusaha mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif. Dalam artian, sepanjang proses perencanaan harus menerima aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perubahan dapat diterima dengan baik. Perencanaan pembangunan yang inovatif memiliki makna bahwa bentuk-bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menekankan dalam penggunaan cara-cara baru

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kota Probolinggo and SKL International, *Probolinggo Urban Sustainability Report*, Pemerintah Kota Probolinggo, 2013.

sekaligus dapat didayagunakan secara maksimal dalam pemecahan masalah dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai paradiplomasi yang terjadi antara Kota Probolinggo dan Helsingborg dengan tujuan memberikan kebaruaran dari proses yang terjadi secara formal maupun non-formal. Karena berfokus pada paradiplomasi yang ditangani langsung oleh pemerintah kota, implementasi dari kerja sama ini diharapkan untuk berdampak langsung kepada masyarakat kota.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan pertimbangan dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis menetapkan rumusan masalah mengenai ***“Bagaimana implementasi kerja sama Kota Probolinggo dan Helsingborg dalam mewujudkan kota berkelanjutan?”***

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini dijabarkan untuk menjelaskan implementasi kerja sama Kota Probolinggo dan Helsingborg dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

---

<sup>10</sup> *Visi & Misi*, Bappedalitbang Kota Probolinggo, diakses dalam <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/visi-misi/>, (18/03/2023, 11:20 WIB).

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan gap research yaitu mengidentifikasi mengenai adanya implementasi nyata di lingkungan Kota Probolinggo sepanjang proses kerja sama yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tahun 2012-2013, serta dilanjutkan pada tahun 2014-2022 di bawah kesepakatan bersama antara Kota Probolinggo dan Helsingborg. Sehingga melalui penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi Ilmu Hubungan Internasional utamanya dalam lingkup kerja sama dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi dan pengembangan pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional seputar kerja sama Kota Probolinggo dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

### 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berdiri sebagai pembanding referensi yang berada dalam lingkup penelitian yang sama dengan tujuan menghindari kemiripan dengan penelitian yang telah ada.

Penelitian pertama dilakukan oleh **Agus Salim, Siti Nursanti Irriani, dan Yunita Rahmi Hapsari** dengan judul **“Implementasi Pendekatan *Symbio-City* pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus *Slums Upgrading* di Kota Yogyakarta”** dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mengatasi daerah kumuh di beberapa titik kota dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *SymbioCity* membantu dalam pengembangan

program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang telah diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menangani wilayah kumuh (*slums upgrading*). Secara kebutuhan, program Kotaku hanya membutuhkan sejumlah elemen analisis pendekatan *SymbioCity* yang relevan untuk program berskala komunitas dan mengabaikan elemen berskala kota untuk peningkatan efektivitas kinerja program.<sup>11</sup>

Kelebihan dari penelitian tersebut yaitu adanya implementasi faktual berupa upaya penanganan lingkungan kumuh melalui pengelolaan limbah rumah tangga, drainase, penyediaan air bersih, dan keteraturan bangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Kotaku sembari mempertimbangkan perluasan aspek penanganan permasalahan secara berkelanjutan dengan mengimplementasi Sebagian elemen pendekatan *SymbioCity*. Namun, yang menjadi kekurangan adalah penelitian ini kurang membahas mengenai isu sosial yang memengaruhi adanya wilayah kumuh yang tidak terbatas hanya pada kemiskinan serta masalah rentan lainnya.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Paulina Ruiz Maya, Regina Pereda Sparrowe, dan César Iván Amador Vázquez** dengan judul "***Umeå, Sweden; Becoming a smart city***" menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi dan wawancara kepada pembuat keputusan dalam pemerintahan Kota Umeå dan akademisi universitas yang terlibat dalam proyek *smart city*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan *smart city* terdapat

---

<sup>11</sup> Agus Salim, Siti Nursanti Irriani, dan Yunita Rahmi Hapsari, *Implementasi Pendekatan Symbio-City pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus Slums Upgrading di Kota Yogyakarta*, Bappenas, Working Paper Vol. 5, No. 2, Juli 2022, diakses dalam <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/114>, (21/03/2023, 16:10 WIB).

sejumlah tantangan berupa kurang dipahaminya kesinambungan definisi *smart city* dengan pembangunan berkelanjutan, sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat sehari-hari, adanya perbedaan prioritas, kepentingan, serta agenda politik juga memengaruhi perencanaan proyek jangka panjang, mengingat struktural pemangku kepentingan yang berubah secara berkala.<sup>12</sup>

Kelebihan dari penelitian tersebut yaitu adanya pengambilan data secara primer melalui wawancara pada sejumlah 8 orang yang terlibat dalam proyek *smart city* Umeå baik dari pemerintah maupun akademisi. Adanya pengambilan data primer menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan faktual dalam mewujudkan Umeå sebagai *smart city* melalui pengambilan keputusan. Namun, yang menjadi kekurangan adalah penelitian ini tidak menjangkau perspektif dari pihak swasta dan publik (masyarakat) yang memiliki peranan yang sama pentingnya dalam proyek *smart city*. Oleh karena itu, kekurangan ini dapat menjadi celah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji perspektif publik terhadap proyek *smart city* Umeå.

Penelitian ketiga dilakukan oleh **Ahm Shamsuzzoha, Juha Nieminen, Sujan Piya, dan Kendall Rutledge** dengan judul “*Smart City for Sustainable Environment: A Comparison of Participatory Strategies from Helsinki, Singapore, and London*” menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, penelitian ini meliputi permasalahan umum dalam mengimplementasikan *Smart City* dalam upaya menggabungkan sumber daya yang ada dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sembari memudahkan

---

<sup>12</sup> Paulina Ruiz Maya, Regina Pereda Sparrowe, and César Iván Amador Vázquez, *Umeå, Sweden; Becoming a smart city*, Thesis, Jönköping: Business Administration, Jönköping University, diakses dalam <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1664801&dswid=-1237> (21/03/2023, 18.19 WIB)

manajemen kota. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan upaya dan strategi kota Helsinki, Singapura, dan London dalam mewujudkan *Smart City* dalam berbagai aspek dan strategi.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan *smart city* kendala yang umum dialami antara lain merupakan masalah keamanan atas informasi dan ancaman privasi sebagai dampak dari adaptasi teknologi yang belum matang. Dalam studi kasus atas strategi Kota Helsinki, Singapura, dan London, ketiga kota memanfaatkan IoT (*Internet of Things*) dalam jaringan sensor dalam analisis *big data* untuk meningkatkan efisiensi energi *smart building* dan kebersihan serta keamanan lingkungan; penggunaan energi secara berkelanjutan ditekankan pada ketahanan konstruksi pembangunan dan materialnya, strategi ini diterapkan Singapura dan Helsinki; penerapan *smart traffic* di mana ketiga kota memusatkan pengembangan jaringan sistem transportasi publik yang kelak akan melibatkan kendaraan otonom elektrik.

Kelebihan dari penelitian tersebut adalah adanya upaya untuk menjelaskan mengenai *smart city* dalam sejumlah perspektif berbeda serta mengilustrasikan bagaimana kesinambungan tujuan dan insiatif *smart city* secara detail sembari menyertakan studi kasus perbandingan tiga kota yang berbeda secara geografis, demografi, dan target utama. Namun, penelitian ini belum menjawab rumusan masalah mengenai tantangan yang kerap diabaikan dalam penelitian mengenai *smart city*.

---

<sup>13</sup> Ahm Shamsuzzoha, Juha Nieminen, Sujan Piya, Kendal Rutledge, *Smart City for Sustainable Environment: A Comparison of Participatory Strategies from Helsinki, Singapore, and London*, CITIES, Vol, 114, (2021), Amsterdam: Elsevier.

Penelitian keempat disusun oleh **Salsabila I. Syalianda dan Ratih D. Kusumastuti** dengan judul *“Implementation of Smart City Concept: A Case of Jakarta Smart City, Indonesia”* menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara kepada dua perwakilan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam Jakarta *Smart City* serta pengambilan data sekunder mengenai *smart city* dan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah atas implementasi enam elemen *smart city* berdasarkan *European Smart Cities* antara lain *smart governance, smart living, smart people, smart mobility, dan smart environment*.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta telah menerapkan enam elemen *smart city* dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi melalui platform daring atau aplikasi yang dapat diakses publik dengan mudah. Tetapi yang menjadi tantangan adalah platform yang telah dikembangkan harus menjadi suatu pengetahuan umum bagi masyarakat serta sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi ibukota yang aman, nyaman, produktif, makmur, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu adanya pengambilan data secara primer melalui wawancara kepada sejumlah orang yang terlibat dalam *Jakarta Smart City*. Adanya pengambilan data primer menghasilkan data yang faktual dalam upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta mewujudkan *smart city* sebagai kota transisi yang menjadi pusat urbanisasi Indonesia. Namun, yang menjadi kekurangan dalam

---

<sup>14</sup> Salsabila I Syalianda and Ratih D Kusumastuti, *Implementation of Smart City Concept: A Case of Jakarta Smart City, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol, 716 (2021), Bristol: IOP Science.

penelitian ini adalah tidak terjangkaunya perspektif publik secara langsung dalam penerapan *smart city* di ibukota DKI Jakarta utamanya dalam kepuasan layanan maupun mengenai kesadaran masyarakat akan adanya fasilitas dan platform yang terhubung secara daring di lingkup ibukota.

Penelitian kelima disusun oleh **Bokolo Anthony Jr.** dengan judul ***“The Role of Community Engagement in Urban Innovation Towards the Co-Creation of Smart Sustainable Cities”*** menggunakan pendekatan kualitatif secara *narrative research* yang mengkaji bagaimana partisipasi komunitas dapat diberdayakan dalam penyusunan inovasi untuk mewujudkan *smart sustainable city*.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi komunitas dalam mewujudkan *smart sustainable city* diterima sebagai dampak yang sangat berperan dalam meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meminimalisasi respon negatif serta menguatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kota.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif *narrative research*, penelitian ini memaparkan tahapan penelitian secara runtut serta memiliki ruang lingkup yang jelas dengan mencantumkan daftar kriteria batasan literatur yang dapat digunakan dalam penelitian sebagai data sekunder. Sedangkan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini terlalu berbasis pada data sekunder tanpa ada validasi dari data primer yang bersumber dari wawancara meski membatasi literatur yang digunakan hanya

---

<sup>15</sup> Bokolo Anthony Jr., *The Role of Community Engagement in Urban Innovations Towards the Co-Creations of Smart Sustainable Cities*, Journal of Knowledge Economy, Vol. 15 (2024), London: Springer.

pada literatur yang menggunakan metodologi yang melibatkan pengumpulan data primer.

Penelitian keenam disusun oleh **Nabila Anggarina Primastuti dan Ardiana Yuli Puspitasari** dengan judul “**Studi Literature: Penerapan *Green Transportation* Untuk Mewujudkan Kota Hijau dan Berkelanjutan**” menggunakan pendekatan kualitatif komparatif yang membandingkan penerapan *green transportation* di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Bogor.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini adalah ketiga kota tersebut memiliki tingkat pemenuhan indikator *green transportation* yang berbeda satu sama lain yang terbagi atas indikator aksesibilitas, moda transportasi, dan kebijakan. Kota yang paling memenuhi ketiga indikator adalah Kota Bogor dengan adanya inklusivitas bagi pejalan kaki berupa jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan lansia, terdapat transportasi umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, serta adanya kebijakan yang meregulasi *green transportation* dalam RTRW Kota Bogor dan adanya penerapan *smart management transportation system*.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu melakukan kajian runtut mengenai kota berkelanjutan yang meliputi kota hijau sebagai konsep pendukung serta *green transportation* sebagai obyek utama penelitian. Pengindeksan matriks untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan parameter *green transportation* yang sejumlah sumber juga dibuat untuk memudahkan identifikasi pemenuhan pelaksanaan *green transportation* di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota

---

<sup>16</sup> Nabila Anggarina Primastuti and Ardiana Yuli Purpitasari, *Studi Literature: Penerapan Green Transportation Untuk Mewujudkan Kota Hijau Dan Berkelanjutan*, Jurnal Kajian Ruang, Vol, 1, No, 1 (2021), Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Bogor secara detail. Namun, yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan atas implementasi *green transportation* hanya bersumber dari kebijakan dan implementasi yang telah ada tanpa adanya pembaruan faktual di lapangan. Selain itu, tidak dijelaskan aspek sosial dalam penerapan *green transportation* bagi masyarakat beserta dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

Penelitian ketujuh disusun oleh **Ismaila Rimi Abubakar dkk.** dengan judul ***“Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South”*** menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui kajian literatur yang bersumber dari artikel jurnal, prosiding sidang, dan buku yang memiliki keteraitan dengan dampak praktik pengelolaan limbah padat terhadap keberlanjutan lingkungan di negara berkembang.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah negara-negara berkembang memiliki kecenderungan menggabungkan sampah rumah tangga dan komersial dengan limbah berbahaya dalam proses mobilisasi dan penyimpanan, penggunaan insinerator terbuka, serta masih banyaknya Tempat Pembuangan Akhir yang hanya berfungsi sebagai tempat penimbunan sampah (*landfill*). Dari hal tersebut juga teridentifikasi praktik pengelolaan limbah yang buruk berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan kota.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu melakukan kajian mendalam mengenai implikasi dan rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam sistem pengelolaan limbah padat sembari mempertegas permasalahan sosial-ekonomi

---

<sup>17</sup> Ismaila Rimi Abubakar et al., *Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South*, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol, 19, No, 19 (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph191912717>.

yang memengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh pengelolaan limbah. Namun, yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak mencantumkan data analisis statistik mengenai dampak pengelolaan limbah padat yang mencakup banyak negara di wilayah berbeda sehingga memungkinkan adanya generalisasi pembahasan.

Penelitian ke delapan disusun oleh **Mochamad Arief Budihardjo, Septa Yudha Ardiansyah, dan Bimastyaji Surya Ramadan** dengan judul *“Community-driven Material Recovery Facility (CdMRF) for Sustainable Economic Incentives of Waste Management: Evidence from Semarang City, Indonesia”* dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif melalui rangkaian survei dan diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di CdMRF atau bank sampah, antara lain 37 pengelola bank sampah, 4 pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2 akademisi, 1 perwakilan industri pangan, 1 organisasi pengelola limbah non-pemerintah (NGO), 230 anggota bank sampah secara acak serta sejumlah 94 pemulung secara acak yang beroperasi di seluruh Kota Semarang sejak Desember 2016 hingga Desember 2018.<sup>18</sup> Hasil dari rangkaian survei dan diskusi sebagai sumber data primer yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi agar bank sampah dapat bertahan secara berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa manajemen limbah padat berbasis komunitas tidak terlalu efektif dalam mengurangi limbah di Kota

---

<sup>18</sup> Mochamad Arief Budihardjo, Septa Yudha Ardiansyah, and Bimastyaji Surya Ramadan, *Community-Driven Material Recovery Facility (CdMRF) for Sustainable Economic Incentives of Waste Management: Evidence from Semarang City, Indonesia*, Habitat International, Vol, 119 (January 2022), Amsterdam: Elsevier.

Semarang dikarenakan minimnya jumlah bank sampah aktif selama lebih dari dua tahun. Sulitnya bank sampah untuk bertahan secara berkelanjutan juga dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan pemangku kebijakan dalam aktivitas pengelolaan limbah, konflik kepentingan, serta manajemen yang buruk berujung sulitnya mendapat kepercayaan masyarakat. Tidak meratanya persebaran jumlah bank sampah di Kota Semarang juga merupakan salah satu bentuk minimnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bank sampah.

Kelebihan penelitian ini yaitu menggunakan metode survei dan diskusi untuk mendapatkan informasi mengenai keterlibatan pengelola dan anggota bank sampah, perwakilan pemerintah, dan pemulung yang dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan serta pengembangan dalam dimensi sosial dan operasional bank sampah untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam upaya daur ulang limbah. Namun, yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah data pelengkap yang menjadi bagian informasi penting dari penelitian ini tidak dapat diakses untuk mendapatkan informasi penuh.

Penelitian ke sembilan disusun oleh **Ratih Dyah Kusumastuti dan Juliana Rouli** dengan judul ***“Smart City Implementation and Citizen Engagement in Indonesia”*** menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan sejumlah 2 perwakilan pemerintah DKI Jakarta, 2 perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2 perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan 4 akademisi

untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi mengenai *smart city* di Indonesia.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah *smart city* merupakan solusi yang memiliki implementasi relatif dan harus disesuaikan dengan keadaan kota dan sumber daya yang ada. Selain itu, kepemimpinan dan komitmen politik juga diperlukan untuk dapat menjamin keberlanjutan implementasi *smart city*, utamanya dalam menjaga timbal balik dengan masyarakat untuk mencapai keberhasilan. Kelebihan dari penelitian ini adalah data yang didapatkan merupakan data primer yang bersumber dari wawancara dan diskusi yang kemudian dianalisa secara runtut dan detail, menghasilkan informasi yang aktual. Namun, yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah hasil yang masih terlalu umum mengenai bagaimana *smart city* dapat dikatakan sebagai berhasil tanpa adanya studi kasus mendalam mengenai implementasi *smart city*.

Penelitian kesepuluh disusun oleh **Anjelina R. Naibaho dkk.** dengan judul **“Efektivitas Aplikasi Bandung *Smart City* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Transformasi Digital 2024”** menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan untuk dapat menganalisis efektivitas aplikasi Bandung *Smart City* sebagai instrumen tata kelola publik yang digunakan masyarakat sebagai layanan digital yang lebih efisien dan responsif.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah sejumlah digitalisasi platform pelayanan

---

<sup>19</sup> Ratih D Kusumastuti and Juliana Rouli, *Smart City Implementation and Citizen Engagement in Indonesia*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol, 940 (2021), Bristol: IOP Science.

<sup>20</sup> Anjelina R Naibaho et al., *Efektivitas Aplikasi Bandung Smart City Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Transformasi Digital 2024*, PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, Vol, 5, No, 1 (Juli 2025), Kendari: Universitas Halu Oleo.

publik terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat respons atas aduan masyarakat, dan meningkatkan jangkauan partisipasi masyarakat dalam perkembangan tata kelola kota. Namun, yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan Kota Bandung menjadi *smart city* adalah kemampuan keterjangkauan layanan digital ke wilayah pinggiran yang selain terbatas pada adanya layanan manual, juga terbatas akan akses jaringan internet, dan kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan platform digital.

Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya penjabaran informasi faktual mengenai implikasi kebijakan *smart city* Kota Bandung dalam melaksanakan *smart government* yang masih cenderung kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat tingkat bawah. Namun, yang menjadi kekurangan adalah penelitian ini hanya mengambil data dari analisis studi literatur tanpa adanya pengambilan data secara primer baik melalui wawancara langsung untuk mendapatkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan masyarakat digital.

Penelitian sebelas disusun oleh **Ovina Elisabeth Lumban Tobing** dengan judul **“Kerjasama Probolinggo – Helsingborg dalam Bidang Pengelolaan Sampah Melalui Konsep Symbiocity dan Kota Hijau 2012-2014”** menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen yang mendukung analisis fenomena pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dalam kerja samanya dengan

Helsingborg pada tahun 2012-2014.<sup>21</sup> Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama Kota Probolinggo dengan Helsingborg melalui program *SymbioCity* dalam pengelolaan sampah cukup efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang terbukti melalui adanya pengurangan volume sampah yang masuk ke pembuangan akhir dan terwujudnya koridor sungai hijau.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki kerangka teori yang jelas, terdiri atas konsep kerja sama internasional dan teori environmentalisme. Penelitian ini memiliki paparan yang jelas dan runtut mengenai masalah sampah, mekanisme kerja sama, dan dampak kerja sama yang juga diasosiasikan dengan program nasional Kota Hijau. Sedangkan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini terlalu berbasis pada data sekunder tanpa validasi data primer berupa wawancara atau observasi lapangan untuk mendukung data sekunder.

#### 1.4.1 Posisi Penelitian

**Tabel 1. 1 Posisi Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Pendekatan <i>Symbio-City</i> pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus <i>Slums Upgrading</i> di Kota Yogyakarta	Jenis penelitian: Deskriptif  Alat analisa: Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pendekatan <i>SymbioCity</i> membantu dalam pengembangan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang telah diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menangani wilayah kumuh ( <i>slums</i> )

<sup>21</sup> Ovina Elisabeth Lumban Tobing, *Kerjasama Probolinggo - Helsingborg Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Melalui Konsep Symbiocity Dan Kota Hijau 2012-2014*, EJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 6, No, 2 (2018), Samarinda: Universitas Mulawarman.

	Oleh: Agus Salim, Siti Nursanti Irriani, dan Yunita Rahmi Hapsari		<i>upgrading</i> ). Berdasarkan elemen analisis yang komprehensif dan menyeluruh, pendekatan <i>SymbioCity</i> dalam implementasinya lebih sesuai diterapkan pada permasalahan berskala meso atau di antara tingkat kota dan kasus spesifik daripada skala kasus spesifik.
2.	<i>Umeå, Sweden; Becoming a smart city</i>  Oleh: Paulina Ruiz Maya, Regina Pereda Sparrowe, dan César Iván Amador Vázquez	Jenis penelitian: Deskriptif  Alat Analisa: Pendekatan kualitatif berbasis observasi dan wawancara	Hasil dari penelitian ini disimpulkan adanya kendala berupa kurang dipahaminya kesinambungan antara definisi <i>smart city</i> serta pembangunan berkelanjutan, sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat sehari-hari, adanya perbedaan prioritas, kepentingan, serta agenda politik juga memengaruhi perencanaan proyek jangka panjang, mengingat struktural pemangku kepentingan yang berubah secara berkala.
3.	<i>Smart City for Sustainable Environment: A Comparison of Participatory Strategies from Helsinki, Singapore, and London</i>  Oleh Ahm Shamsuzzoha, Juha Nieminen, Sujan Piya, dan Kendal Rutledge	Jenis penelitian: Deskriptif  Alat analisa: Pendekatan kualitatif komparatif	Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan <i>Smart City</i> kendala yang umum dialami antara lain merupakan masalah keamanan atas informasi dan ancaman privasi sebagai dampak dari adaptasi teknologi yang belum matang. Dalam studi kasus atas strategi Kota Helsinki, Singapura, dan London, ketiga kota memanfaatkan IoT ( <i>Internet of Things</i> ) dalam jaringan sensor dalam analisis <i>big data</i> untuk meningkatkan efisiensi energi

			<p><i>smart building</i> dan kebersihan serta keamanan lingkungan; penggunaan energi secara berkelanjutan ditekankan pada ketahanan konstruksi pembangunan dan materialnya, strategi ini diterapkan Singapura dan Helsinki; penerapan <i>smart traffic</i> di mana ketiga kota memusatkan pengembangan jaringan sistem transportasi publik yang kelak akan melibatkan kendaraan otonom elektrik.</p>
4.	<p><i>Implementation of Smart City Concept: A Case of Jakarta Smart City, Indonesia</i></p> <p>Oleh: Salsabila I Syalianda dan Ratih D Kusumastuti</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta telah menerapkan enam elemen <i>smart city</i> dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi melalui platform daring atau aplikasi yang dapat diakses publik dengan mudah. Tetapi yang menjadi tantangan adalah platform yang telah dikembangkan harus menjadi suatu pengetahuan umum bagi masyarakat serta sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi ibukota yang aman, nyaman, produktif, makmur, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.</p>
5.	<p><i>The Role of Community Engagement in Urban Innovation Towards the Co-Creation of Smart Sustainable Cities</i></p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif <i>narrative research</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi komunitas dalam mewujudkan <i>smart sustainable city</i> diterima sebagai dampak yang sangat berperan dalam meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan</p>

	Oleh: Bokolo Anthony Jr.		masyarakat dengan meminimalisasi respon negatif serta menguatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kota.
6.	<p>Studi Literature: Penerapan <i>Green Transportation</i> Untuk Mewujudkan Kota Hijau dan Berkelanjutan</p> <p>Oleh: Nabila Anggarina Primastuti dan Ardiana Yuli Puspitasari</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif komparatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ketiga kota tersebut memiliki tingkat pemenuhan indikator <i>green transportation</i> yang berbeda satu sama lain yang terbagi atas indikator aksesibilitas, moda transportasi, dan kebijakan. Kota yang paling memenuhi ketiga indikator adalah Kota Bogor dengan adanya inklusivitas bagi pejalan kaki berupa jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan lansia, terdapat transportasi umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, serta adanya kebijakan yang meregulasi <i>green transportation</i> dalam RTRW Kota Bogor dan adanya penerapan <i>smart management transportation system</i>.</p>
7.	<p><i>Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South</i></p> <p>Oleh: Ismaila Rimi Abubakar dkk.</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah negara-negara berkembang memiliki kecenderungan menggabungkan sampah rumah tangga dan komersial dengan limbah berbahaya dalam proses mobilisasi dan penyimpanan, penggunaan insinerator terbuka, serta masih banyaknya Tempat Pembuangan Akhir yang hanya berfungsi sebagai</p>

			tempat penimbunan sampah ( <i>landfill</i> ). Dari hal tersebut juga teridentifikasi praktik pengelolaan limbah yang buruk berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan kota.
8.	<p><i>Community-driven Material Recovery Facility (CdMRF) for Sustainable Economic Incentives of Waste Management: Evidence from Semarang City, Indonesia</i></p> <p>Oleh: Mochamad Arief Budihardjo, Septa Yudha Ardiansyah, dan Bimastyaji Surya Ramadan</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kuantitatif berbasis survei</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa manajemen limbah padat berbasis komunitas tidak terlalu efektif dalam mengurangi limbah di Kota Semarang dikarenakan minimnya jumlah bank sampah aktif selama lebih dari dua tahun. Sulitnya bank sampah untuk bertahan secara berkelanjutan juga dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan pemangku kebijakan dalam aktivitas pengelolaan limbah, konflik kepentingan, serta manajemen yang buruk berujung sulitnya mendapat kepercayaan masyarakat. Tidak meratanya persebaran jumlah bank sampah di Kota Semarang juga merupakan salah satu bentuk minimnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bank sampah.</p>
9.	<p><i>Smart City Implementation and Citizen Engagement in Indonesia</i></p> <p>Oleh: Ratih Dyah Kusumastuti dan Juliana Rouli</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif berbasis wawancara</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah <i>smart city</i> merupakan solusi yang memiliki implementasi relatif dan harus disesuaikan dengan keadaan kota dan sumber daya yang ada. Selain itu, kepemimpinan dan komitmen</p>

			<p>politik juga diperlukan untuk dapat menjamin keberlanjutan implementasi <i>smart city</i>, utamanya dalam menjaga timbal balik dengan masyarakat untuk mencapai keberhasilan.</p>
10.	<p>Efektivitas Aplikasi Bandung <i>Smart City</i> dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Transformasi Digital 2024</p> <p>Oleh: Anjelina R. Naibaho dkk.</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sejumlah digitalisasi platform pelayanan publik terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat respons atas aduan masyarakat, dan meningkatkan jangkauan partisipasi masyarakat dalam perkembangan tata kelola kota. Namun, yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan Kota Bandung menjadi <i>smart city</i> adalah kemampuan keterjangkauan layanan digital ke wilayah pinggiran yang selain terbatas pada adanya layanan manual, juga terbatas akan akses jaringan internet, dan kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan platform digital.</p>
11.	<p>Kerjasama Probolinggo – Helsingborg dalam Bidang Pengelolaan Sampah Melalui Konsep Symbiocity dan Kota Hijau 2012 – 2014</p> <p>Oleh: Ovina Elisabeth Lumban Tobing</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kerja sama Kota Probolinggo dengan Helsingborg melalui program <i>SymbioCity</i> dalam pengelolaan sampah cukup efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang terbukti melalui adanya pengurangan volume sampah yang masuk ke pembuangan akhir dan terwujudnya koridor sungai hijau.</p>

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Konsep Paradiplomasi

Kajian dalam penelitian ini memiliki fokus utama pada hubungan kerja sama antara Kota Probolinggo dan Helsingborg yang merupakan bentuk penerapan diplomasi antar aktor sub-negara dengan fokus mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota berkelanjutan, oleh karena itu, hal ini menjadi landasan utama penggunaan konsep paradiplomasi. Paradiplomasi menurut Soldatos merupakan perluasan makna diplomasi dengan membawa diplomasi ke dalam lingkup yang lebih luas melalui keterlibatan aktor sub-negara dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan keterlibatan aktor sub-negara dapat terdiri dari kombinasi organisasi perangkat daerah, lembaga asing publik, maupun lembaga swasta asing dari dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengembangkan aspek permasalahan sosial-ekonomi, politik, budaya, maupun lingkungan yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaannya, kegiatan eksternal yang melibatkan aktor non-negara dapat diklasifikasikan sebagai paradiplomasi apabila mengandung elemen kebijakan luar negeri dan pembuatan kebijakan luar negeri. Aktor non-negara seperti pemerintah daerah yang memiliki kendali atas otonomi daerahnya dan telah dijalankan secara efektif akan mampu menyusun objektif yang akan diterapkan dalam kebijakan luar negerinya terutama untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Noé Cornago, 2018, *Paradiplomacy and Protodiplomacy*, The Encyclopedia of Diplomacy, New Jersey: Wiley-Blackwell, hal. 1–3.

<sup>23</sup> Panayotis Soldatos and Hans J. Michelmann, 1990, *An Explanatory Framework for the Study of Federated States Ad Foreign-Policy Actors*, Oxford: Oxford University Press, hal. 35.

Menurut Duchacek, berdasarkan dimensi geopolitik, batasan kerja sama terbagi menjadi tiga, yaitu **paradiplomasi lintas batas regional** (*transborder regional paradiplomacy*), **paradiplomasi transregional** (*transregional paradiplomacy*), dan **paradiplomasi global** (*global paradiplomacy*).<sup>24</sup>

Paradiplomasi lintas batas regional merupakan hubungan kerja sama yang melibatkan kontak antar aktor non-negara yang memiliki batas geografis yang sama<sup>25</sup> atau tumpang tindih; paradiplomasi transregional merupakan hubungan kerja sama antar aktor non-negara yang secara geografis terpisah oleh provinsi lain atau berada di bawah yurisdiksi berbeda yang masih berdekatan<sup>26</sup>; paradiplomasi global yaitu kontak yang melibatkan hubungan antara aktor non-negara dengan aktor non-negara lain berupa pemerintah daerah maupun lembaga asing baik dalam bidang perdagangan, industri, maupun kebudayaan.<sup>27</sup>

Soldatos mengemukakan sejumlah kondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebelum dapat dipastikan bahwa kegiatan paradiplomasi dapat dilaksanakan dengan baik. Sejumlah kondisi tersebut adalah keadaan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dibagi menjadi empat antara lain adalah *cooperative-coordinated* yaitu, paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat; *cooperative-joint* di mana kegiatan paradiplomasi termasuk ke

---

<sup>24</sup> Duchacek, Ivo, 1990, *Perforated Sovereignties*, hal. 16 dalam Hans J Michelmann et al., *Federalism and International Relations the Role of Subnational Units*, ed. Hans J Michelmann and Panayotis Soldatos, Oxford: Clarendon Press.

<sup>25</sup> Alexander S Kuznetsov, 2015, *Theory and Practice of Paradiplomacy*, New York: Routledge, hal. 108.

<sup>26</sup> Ivo Duchacek, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 26.

dalam kebijakan luar negeri pemerintah pusat; *parallel-harmony* yaitu, ketika kegiatan paradiplomasi dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dan tetap sejalan dengan kebijakan luar negeri; dan *parallel-disharmony* merupakan kebalikan dari *parallel-harmony* karena kegiatan paradiplomasi pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah pusat sehingga rawan terjadi konflik karena sering bermuatan gerakan separatis nasionalis.<sup>28</sup>

Hingga tahun 1970-an, studi atas paradiplomasi sebagian besar berpusat pada negara-negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang menerapkan sistem negara federal<sup>29</sup>, dan pada tahun 2000-an paradiplomasi mulai meluas secara global seperti ke wilayah negara-negara Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Oseania, terutama negara-negara yang tidak menerapkan sistem federal.<sup>30</sup>

Kuznetsov memaparkan bahwa sejumlah peneliti membagi fokus penelitian paradiplomasi menjadi 11, antara lain adalah **lingkup konstitusional** yang penelitiannya berfokus pada paradiplomasi dengan sudut pandang pemerintah; **lingkup federalis** yang penelitiannya mengambil aktivitas regional sebagai faktor yang memengaruhi sistem federal; **lingkup nasionalisme** yang penelitiannya berpedoman pada paham bahwa diplomasi berperan besar dalam meningkatkan nasionalisme di tingkatan negara multinasional dan multibahasa; **lingkup hubungan internasional** yang penelitiannya memahami paradiplomasi memiliki

---

<sup>28</sup> Panayotis Soldatos and Hans J. Michelmann, *Op. Cit.* hal.114.

<sup>29</sup> Alexander S Kuznetsov, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>30</sup> Rodrigo Tavares, 2016, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*, Oxford: Oxford University Press, dalam Thomas Jackson, *Paradiplomacy and Political Geography: The Geopolitics of Substate Regional Diplomacy*, Geography Compass, Vol, 12, No, 2, (2018), New Jersey: Wiley-Blackwell, hal. 4.

jangkauan yang luas dan berpengaruh secara internasional; **lingkup studi perbatasan** yang penelitiannya identik dengan paham bahwa permasalahan seputar politik, sosial, ekonomi, dan sosial yang dibahas dalam paradiplomasi terbatas pada batas geografis; **lingkup globalisasi** yang pada penelitiannya paradiplomasi dipahami sebagai perwujudan kekuatan regionalisasi dan globalisasi; **lingkup keamanan/geopolitik** yang penelitiannya berfokus pada konsekuensi atas keterlibatan pemerintahan daerah di dunia internasional terhadap keamanan dan geopolitiknya; **lingkup ekonomi global** penelitiannya berfokus pada paradiplomasi dalam pengembangan ekonomi global dan perdagangan dunia; **lingkup lingkungan** yang penelitiannya menggunakan sudut pandang ekologis mengenai dampak aktor sub-negara yang dipengaruhi rezim lingkungan internasional; **lingkup diplomasi** yang penelitiannya berfokus pada dampak diplomasi aktor sub-negara pada aktor negara; dan **lingkup separatistis** yang penelitiannya membahas permasalahan negara setelah jatuhnya federasi komunis.<sup>31</sup>

### **1.5.2 Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

Kajian dalam penelitian ini juga berfokus pada upaya Kota Probolinggo mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai bukti nyata implementasi kerja sama dengan Helsingborg. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang tercipta dari kritik atas pembangunan yang tidak linear dengan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya terutama di negara-negara maju dan berkembang.

---

<sup>31</sup> Alexander S. Kuznetsov, *Op. Cit.*, hal. 50–51.

Konsep utama pembangunan berkelanjutan menggarisbawahi sejumlah prinsip yang meliputi memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi saat ini dan mendatang sembari meningkatkan kualitas hidup serta kesetaraan dan menjaga serta melestarikan lingkungan termasuk sumber daya di dalamnya.<sup>32</sup>

*Sustainable Development Goals* atau SDGs merupakan suatu tujuan universal yang disepakati oleh 193 negara di dunia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara merata dan meliputi perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama antar pemerintah.<sup>33</sup> SDGs sebagai agenda pembangunan 2030 yang lebih komprehensif dari MDGs (*Millenium Development Goals*) memiliki 17 tujuan dan 5 prinsip dasar yang terdiri atas *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership* dalam 3 dimensi yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling bersinergi.<sup>34</sup>

SDGs terdiri atas 17 tujuan antara lain yaitu *No Poverty; Zero Hunger; Good Health and Well-being; Quality Education; Gender Equality; Clean Water and Sanitation; Affordable and Clean Energy; Decent Work and Economic Growth; Industry, Innovation, and Infrastructure; Reduced Inequalities; Sustainable Cities and Communities; Responsible Consumption and Production; Climate Action; Life Below Water; Life on Land; Peace, Justice, and Strong Institutions; dan Partnership for the Goals*. Dalam penelitian ini, sejumlah program yang menjadi bagian dari upaya Kota Probolinggo dalam mewujudkan kota

---

<sup>32</sup> Tomislav Klarin, *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>33</sup> United Nations, *Op. Cit.*

<sup>34</sup> Mirna Amirya and Gugus Irianto, *Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol, 9, No. 1 (2023): 188, <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>.

berkelanjutan melalui kerja sama dengan Helsingborg utamanya meliputi poin SDGs 1 yang berfokus dalam pengentasan segala bentuk kemiskinan di manapun; SDGs 5 yang berfokus pada mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; SDGs 6 yang berfokus dalam penjaminan ketersediaan, manajemen air, dan sanitasi yang berkelanjutan; SDGs 11 yang berfokus dalam mewujudkan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; SDGs 12 yang berfokus pada penjaminan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; SDGs 13 yang berfokus pada pengambilan tindakan dalam melawan perubahan iklim dan dampaknya; SDGs 16 yang berfokus pada upaya memperjuangkan masyarakat yang damai, inklusi, dan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.<sup>35</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai proses serta implementasi kerja sama antara Kota Probolinggo dan Helsingborg dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Penelitian kualitatif lebih menonjolkan proses dan makna sembari menggunakan landasan teori sebagai panduan penelitian sehingga penelitian tetap faktual dengan data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan penelitian

---

<sup>35</sup> United Nations, *The 17 Goals*, United Nations, 2015.

deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu hasil penelitian melalui deskripsi, penjelasan, serta validasi atas fenomena yang diteliti.<sup>36</sup>

### **1.6.2 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif atas data yang diperoleh melalui studi pustaka dari sumber-sumber seperti jurnal penelitian, buku, berita, laman internet, arsip laporan, maupun arsip dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menelaah fenomena yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma secara teoretis.<sup>37</sup> Peneliti menganalisis proses dan implementasi kerja sama antara Kota Probolinggo dan Helsingborg yang dikorelasikan dengan konsep paradiplomasi dan *Sustainable Development Goals* sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan kota berkelanjutan.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **A. Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah sejak program *SymbioCity* diadakan secara resmi hingga dilanjutkan secara mandiri atas kesepakatan Bersama di bawah pengawasan SALAR International pada tahun 2012, yang berakhir pada tahun 2022. Batasan waktu ini dipilih untuk dapat mencakup keseluruhan proses utama kerja sama Kota Probolinggo dan Helsingborg serta menyesuaikan dengan ketersediaan data primer dalam jangka waktu tersebut.

---

<sup>36</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, hal. 6–8.

<sup>37</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hal. 291.

## **B. Batasan Materi**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi materi penelitian dengan berfokus pada kerja sama Kota Probolinggo dan Helsingborg dalam mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Probolinggo.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang bersumber dari studi pustaka melalui telaah literatur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mengkaji penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik kajian pustaka atas sejumlah jurnal penelitian, buku, berita, laman internet, arsip laporan, maupun arsip dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.7 Argumen Pokok**

Kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang efisien. Melalui kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, pemerintah daerah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pertukaran budaya, meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan mempromosikan potensi daerah selama kerja sama tersebut selaras dengan kepentingan nasional.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo dengan Helsingborg bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk

dapat melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Permasalahan yang menjadi objektif utama pemerintah Kota Probolinggo untuk ditekankan antara lain adalah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, peningkatan sistem pengelolaan limbah, wilayah kumuh, pembangunan ruang terbuka hijau, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Probolinggo. Keseluruhan kerja sama antara Kota Probolinggo dan Helsingborg tidak bertujuan menyelesaikan permasalahan Kota Probolinggo secara langsung, melainkan membantu melalui peningkatan kemampuan pemerintah Kota Probolinggo dalam perencanaan pembangunan kota jangka panjang.

## 1.8 Struktur Penulisan

**Tabel 1. 2 Struktur Penulisan**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
------------------------------	---

<p><b>BAB II</b>  <b>KERJA SAMA KOTA</b>  <b>PROBOLINGGO DAN</b>  <b>HELSINGBORG DALAM</b>  <b>MEWUJUDKAN KOTA</b>  <b>BERKELANJUTAN</b></p>	<p>2.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan di Kota Probolinggo</p> <p>2.2 Perkembangan <i>SymbioCity</i> oleh Swedia dan Pelaksanaannya</p> <p>2.2.1 Swedia dan <i>SymbioCity</i></p> <p>2.2.2 Mekanisme Pelaksanaan <i>SymbioCity</i></p> <p>2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Paradiplomasi di Indonesia</p> <p>2.4 Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg dalam <i>SymbioCity</i></p>
<p><b>BAB III</b>  <b>PROSES KERJA SAMA</b>  <b>KOTA PROBOLINGGO</b>  <b>DAN HELSINGBORG</b></p>	<p>3.1 Peran dan Posisi Kota Helsingborg dalam Kerja Sama <i>SymbioCity</i></p> <p>3.2 Proses Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg</p> <p>3.2.1 Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg Periode I (2012-2013)</p> <p>3.2.2 Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg Periode II (2014-2022)</p> <p>3.3 Kerangka Keterkaitan Paradiplomasi dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg</p> <p>3.4 Kendala Sepanjang Kerja Sama Kota Probolinggo dan Helsingborg</p>
<p><b>BAB IV</b>  <b>PENUTUP</b></p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>